

DEMOKRASI DAN KEBEBASAN BERPENDAPAT DI MEDIA SOSIAL: ANALISIS SENTIMEN DI TWITTER

¹⁾Herman Lawelai, ²⁾Anwar Sadat, ³⁾Ansar Suherman

^{1,2)}Ilmu Pemerintahan, Universitas Muhammadiyah Buton

³⁾Ilmu Komunikasi, Universitas Muhammadiyah Buton

hermanlawelai@yahoo.com

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui sentimen publik terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat di media sosial Twitter. Studi ini menganalisis dan menggunakan data yang tersedia di Drone Emprit Academic. Studi ini menganalisis total 1.388.221 tweet yang terkumpul di Twitter dengan tweet “Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat”. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat selama tahun 2021 adalah positif dengan 54%, 43% merespon negatif, dan merespon netral sebesar 3%. Dengan demikian media sosial menciptakan ruang di mana orang dapat memahami, berbagi, dan interaktif menegosiasikan makna protes melalui dialog tentang demokrasi, meskipun data dan informasi yang disebarkan melalui media sosial seperti Twitter dapat dianggap tidak dapat diandalkan karena siapa pun yang memiliki akun dapat menyebarkan informasi.

Kata Kunci: Demokrasi, Kebebasan Berpendapat, DEA, Media Sosial, Twitter

Abstract

This study aims to determine public sentiment towards democracy and freedom of opinion on Twitter social media. This study analyzes and uses the data available on the Drone Emprit Academic. This study analyzes a total of 1,388,221 tweets were collected on Twitter with the tweet “Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat”. The results of this study indicate that the public response to democracy and freedom of opinion during 2021 is positive with 54%, 43% responding negatively, and the rest responding neutrally at 3%. Thus, social media facilitates the creation of a space where people can understand, share, and interactively negotiate the meaning of protest through dialogue about democracy, although data and information disseminated through social media such as Twitter can be considered unreliable because anyone with an account can disseminate information.

Keywords: Democracy, Freedom of Opinion, DEA, Social Media, Twitter

A. PENDAHULUAN

Saat ini perkembangan teknologi informasi dan komunikasi berkembang pesat dan terbukti memberikan manfaat bagi pengguna media sosial. Setiap pengguna dapat mengakses informasi hanya dengan menggunakan ponsel atau perangkat komunikasi lain yang terhubung ke internet. Masyarakat dari segala usia dan golongan dapat dengan mudah mengakses internet sebagai sarana komunikasi dan berbagi informasi tanpa batas waktu, salah satunya melalui media sosial Twitter.

Dilihat dari satu aspek, keberadaan media sosial dapat memberikan manfaat bagi masyarakat. Seluruh lapisan masyarakat dapat menggunakan media sosial untuk mengekspresikan diri, salah satunya melalui penyampaian pemikiran berupa kritik terhadap pemerintah. Indonesia adalah pasar media sosial terbesar di Asia Tenggara dengan lebih dari 79 juta pengguna aktif. Selain masyarakat, instansi pemerintah kini aktif mengadopsi media sosial sebagai salah satu platform komunikasi mereka. Komunikasi dua arah terjadi secara terbatas, terutama dalam diskusi reguler. Lembaga berbasis kebijakan menggunakan media sosial untuk menyampaikan informasi, sehingga keterlibatan mereka sangat rendah. Meskipun agensi mengizinkan komentar dari setiap pengikut di halaman Facebook, tidak ada kontak antara organisasi dan publik. Pihak agensi tampaknya lebih aktif menanggapi pesan melalui Twitter. Banyak pengikut berita palsu dan buzzer politik di Twitter mendukung asumsi bahwa tujuan utama agensi berada di Twitter adalah untuk mengirimkan informasi. Kurangnya keterlibatan terjadi dalam komunikasi kampanye, serta dalam komunikasi krisis dan darurat, bentuk komunikasi yang mendesak dan krusial (Idris, 2018).

Dengan menyebarkan informasi darurat kepada masyarakat yang terkena dampak bencana, platform media sosial seperti Twitter memainkan peran penting dalam penanggulangan bencana. Ini adalah situs paling populer keempat untuk menemukan informasi darurat. Banyak penelitian telah menyelidiki data media sosial untuk lebih memahami jaringan dan mengekstrak informasi penting untuk mengembangkan rencana mitigasi sebelum dan sesudah bencana (Kim & Hastak, 2018).

Terlepas dari harapan bahwa penggunaan media sosial di sektor publik hanya akan meningkatkan respons pemerintah terhadap warga negara, hanya ada sedikit penelitian empiris tentang apakah penggunaan media sosial mengarah pada praktik administrasi publik yang lebih responsif dan bagaimana pemerintah menggunakan media sosial untuk membangun negara yang berpusat pada warga (Eom dkk., 2018).

Namun dalam praktiknya, banyak masalah yang muncul akibat kritik masyarakat terhadap pemerintah melalui media sosial. Kebebasan berekspresi di media sosial mendorong pemilih muda untuk berpartisipasi dalam pemilu dan mempengaruhi keputusan pemungutan suara dengan menambahkan pendapat, berkomentar, berteman, mengikuti kandidat, dan dengan mudah membagikan tautan dan memposting 'suka'. Kaum muda sering digambarkan sebagai orang yang tidak tertarik dan bahkan apatis secara politik, percaya bahwa mereka tidak akan didengar. Namun, kemajuan teknologi telah melenyapkan ide ini dengan menghilangkan hambatan kebebasan berekspresi. Kemampuan memperoleh informasi tanpa batas dan berinteraksi di media sosial juga mendorong pemilih muda untuk memilih (Astuti, 2016). Pertumbuhan kekuatan platform online dan media sosial di era digital, dan dampaknya terhadap privasi (Kouroupis & Vagianos, 2021). Penggunaan media sosial secara luas oleh pemilih, partai politik, dan kelompok kepentingan sebagai tanggapan atas rencana implementasi dan untuk mempromosikan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya (Pal, 2020).

Munculnya komunikasi media sosial telah memaksa pemerintah untuk memberikan jawaban rasional atas pertanyaan masyarakat melalui media sosial (Buso, 2018). Media sosial saat ini menjadi yang terdepan, sehingga memudahkan masyarakat untuk berinteraksi. Ulama pun merespon positif dengan mengungkapkan dukungannya terhadap kebebasan berpendapat dan berekspresi di media sosial (Sreeramulu, 2018).

Kebebasan untuk membentuk dan bergabung dengan organisasi, kebebasan berekspresi, hak untuk memilih, kesesuaian untuk bersaing dalam jabatan publik, hak pemimpin politik untuk mendukung dan memilih, sumber informasi alternatif, dan

pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil adalah semua karakteristik demokrasi, menurut Dahl (Hayes & Zashin, 1975). Pasang surut gerakan reformasi media yang terlupakan dalam mencari alternatif dan jalan yang belum dijelajahi. Diperlukan berbagai kebijakan untuk menata ulang media berdasarkan nilai-nilai demokrasi untuk era digital, baik sekarang maupun yang akan datang (Pickard, 2014). Demokrasi menyediakan kerangka kerja untuk menganalisis berbagai kualitas tekstual dokumen konstitusional (Gammelgaard & Holmøyvik, 2014).

Sepuluh dari dua belas negara terbesar di dunia secara demokratis. Namun, politik di bawah tingkat nasional mengungkapkan pola liberalisme yang mendorong batas-batas penelitian dan pengawasan demokrasi (Behrend & Whitehead, 2016). Praktik disinformasi yang diadopsi pada tahun 2018, ditandatangani oleh platform online seperti Facebook, Google, Twitter, dan Mozilla, adalah pesan untuk kesehatan masyarakat dan demokrasi (Đukanovic, 2021).

Akibatnya, terutama selama kampanye pemilu, platform online harus lebih transparan tentang informasi yang mereka simpan. Setelah itu, akan ada diskusi literasi informasi dan media sosial. Akhirnya, artikel ini menyimpulkan bahwa ruang lingkup undang-undang informasi baru, yang dibatasi oleh kebebasan berekspresi, tetap ada. Dia berpendapat bahwa mendeteksi informasi palsu oleh pengguna platform adalah metode untuk mengurangi dampak informasi tersebut pada debat pemilu (Couzigou, 2021). Protes sering mengilhami perubahan sosial yang positif dan meningkatkan perlindungan hak asasi manusia sepanjang sejarah, dan mereka terus membantu mendefinisikan dan melindungi ruang sipil di semua bagian dunia (Kisom, 2021).

Kebebasan berekspresi, sebagaimana dijamin oleh konstitusi, layak mendapat pengakuan atas peran penting yang dimainkannya dalam demokrasi konstitusional (Watney, 2020). Dalam dunia hak asasi manusia saat ini, Internet telah menjadi salah satu isu terpenting yang mempengaruhi kebebasan berekspresi. Sejak awal abad kedua puluh satu, perubahan dramatis telah terjadi di sektor media, khususnya; media sosial kini telah melampaui dominasi media tradisional. Ketersediaan informasi yang berkelanjutan dari Internet memungkinkan

warga negara untuk menjadi lebih berpengetahuan tentang urusan negara, dan dengan demikian Internet dapat meningkatkan hubungan antara warga negara dan aktor negara. Meskipun ada tantangan kebebasan berekspresi di Internet yang dapat ditemukan di negara-negara demokrasi atau bahkan demokrasi yang sudah mapan di seluruh dunia. Namun, makalah ini bersifat deskriptif, untuk menguji dampak dan proses Internet terhadap kebebasan berekspresi, dan mendefinisikan kebijakan dan tindakan terkait Internet, dan bagaimana mereka dirancang untuk mengontrol kebebasan berekspresi di semua negara. keliling dunia (Momen, 2020).

Aktivitas politik, seperti mempromosikan perdamaian atau demokrasi, dan ekspresi pendapat dan perbedaan pendapat, agama, atau kepercayaan akibatnya, warga yang mengirim SMS, email, atau forum tertutup lainnya disamakan dengan mereka yang menulis pembaruan status. di Twitter, dinding Facebook, dan platform media sosial lainnya (Saraswati, 2019).

Efek yang lebih luas dari operasi cyber pada politik, sipil, dan hak asasi manusia telah diselidiki dalam literatur keamanan cyber; serangan siber telah merusak kebebasan berekspresi dalam konflik Ukraina dan konflik politik lainnya; konsep pemaksaan tidak cukup untuk menjelaskan dampak sosio-psikologis dari operasi cyber modern (Burton, 2019).

Pemerintah di seluruh dunia mengatur informasi media sosial untuk memerangi berita palsu. Namun, ada risiko penyebaran informasi yang tidak terkendali akan berdampak lebih besar karena pengaruh berita palsu dan menyesatkan (Vese, 2021).

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengkaji sentimen di jejaring media sosial untuk meningkatkan responsivitas pemerintah. Oleh karena itu, kami mengadopsi analisis jaringan Twitter. Hal ini dilakukan karena jaringan Twitter berkontribusi dalam meningkatkan responsivitas pemerintah dengan memungkinkannya mengatasi keterputusan antara warga dan pemerintah daerah, serta asimetri informasi antara pejabat publik, dan warga.

B. METODE PENELITIAN

Artikel ini menggunakan data sekunder dalam hubungannya dengan pendekatan media sosial, khususnya Twitter. Analisis Sentimen, seperti yang disajikan dalam Drone

Esprit, digunakan oleh penulis. Website Universitas Islam Indonesia menampilkan data dan analisis media sosial tentang beberapa isu sosial yang menarik dengan menggunakan Artificial Intelligence (AI). Alat berbasis AI memainkan peran yang semakin penting di media, dari alat pintar yang membantu peneliti menganalisis data secara otomatis melalui alat yang mereka gunakan (Helberger dkk., 2020). Penulis juga menelusuri artikel bereputasi melalui aplikasi Publish or Perish untuk referensi artikel dengan kata kunci demokrasi dan kebebasan berpendapat dari berbagai perspektif.

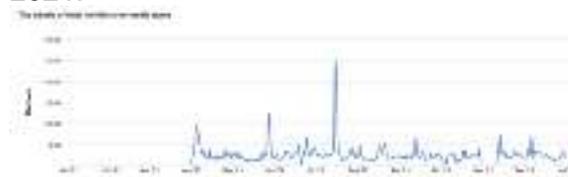
Penelitian ini memanfaatkan data Twitter yang di-crawl oleh aplikasi Ismail Fahmi (Fahmi, 2018), Drone Emprit Academic (DEA). "Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat" adalah kata kunci yang digunakan untuk penyajian data. DEA mengumpulkan percakapan dari 1 Januari 2021 hingga 1 Desember 2021. DEA memperoleh data melalui Antarmuka Program Aplikasi Twitter. Untuk mengambil data ini melalui panggilan API, gunakan metode berikut: {"id":1219,"name":"Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat","start_date":"2021-1-1","end_date":"2021-12-31","data":{"neg":594325,"pos":746721,"net":46853}}.

Penelitian ini mengkaji semua tweet yang diproses, opini publik tentang "Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat" diselidiki (termasuk mention, retweet, dan balasan). Mesin DEA menentukan apakah emosi utama itu positif, negatif, atau netral dengan menganalisis frekuensi kata dan suasana hati Twitter. Algoritme penginderaan DEA dibuat menggunakan metode pembelajaran mesin, dan hasilnya diinterpretasikan menggunakan pengklasifikasi probabilistic (Fahmi, 2017). Saat ini, penyedia layanan Telekomunikasi menghasilkan banyak catatan data. Pemahaman yang jelas tentang pelanggan mereka adalah kunci keberhasilan institusi mana pun. Untuk menganalisis perilaku dan hubungan antara pelanggan, analisis jaringan biasanya digunakan untuk mendeteksi influencer dan komunitas bersama di media sosial (Werayawarangura dkk., 2016). Analisis jaringan bukanlah teori formal dalam sosiologi melainkan strategi untuk menyelidiki struktur sosial (Otte & Rousseau, 2002).

C. HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam perkembangannya, media sosial menjadi tren baru bagi masyarakat untuk mengkomunikasikan tujuan politiknya. Media sosial dipandang sebagai cara paling efektif dan praktis untuk menyampaikan ide dan sudut pandang untuk mengkritisi suatu kebijakan pemerintah. Hal ini erat kaitannya dengan kemudahan situs media sosial yang dapat diakses melalui perangkat mobile. Pada awalnya, media sosial hanya sebagai wahana jejaring sosial, tetapi juga digunakan sebagai media dalam demokrasi. Pengguna memutuskan bagaimana menggunakan teknologi untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka. Hasil penelitian yang dilakukan oleh CK Jha dan Kodila-Tedika mengeksplorasi hubungan antara media sosial dan demokrasi di lebih dari 125 negara di dunia (Jha & Kodila-Tedika, 2020).

Selama periode penelitian ini, 1.388.221 sebutan dikumpulkan di Twitter. Gambar 1 menunjukkan bahwa mentions paling banyak dilakukan pada tanggal 4 April, 27 Mei, dan mencapai puncaknya pada tanggal 15 Juli 2021.



Gambar 1. Menyebutkan berdasarkan tanggal

Pada Gambar 1, tren kicauan warga dunia maya terlihat merespons berbagai kebijakan terkait isu demokrasi dan kebebasan berpendapat di media Twitter. Negara yang paling banyak memberikan komentar mengenai masalah ini adalah Indonesia dan Turki. Isu yang dikomentari banyak pengguna Twitter di Indonesia sangat beragam, mulai dari isu SARA hingga pembubaran organisasi Front Pembela Islam (FPI) oleh pemerintah, serta komentar netizen tentang sebagian besar media sosial di Indonesia yang melakukan propaganda, menghasut dan memecah belah bangsa.

Sementara komentar dari negara Turki paling sering menanggapi kebijakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan setelah mengumumkan pembukaan Pulau Demokrasi dan Kebebasan di laut dekat Istanbul pada tahun 2021. Menurut Erdogan, ia telah memberi pulau itu identitas baru. Yassıada, salah satu Kepulauan Pangeran, terkenal

dengan penutupan militer dan kudetanya pada tahun 1960. Pulau ini berganti nama menjadi Pulau Demokrasi dan Kebebasan pada tahun 2013. Yassiada, yang terletak di Laut Marmara, Istanbul, dianggap sebagai momen terburuk dari demokrasi Turki. Hal inilah yang membuat warga Turki memberikan sentimen yang beragam dalam menanggapi kebijakan pemerintah Turki.

Adapun analisis tren sentimen demokrasi dan kebebasan berpendapat tahun 2021. Pada tanggal 16 Juni 2021, 17 Juni 2021, sentimen tersebut merupakan keseimbangan antara positif dan negatif, seperti terlihat pada Gambar 2 di bawah ini:

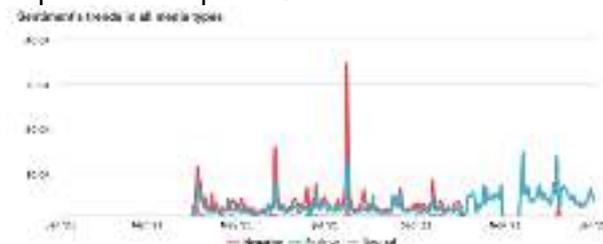
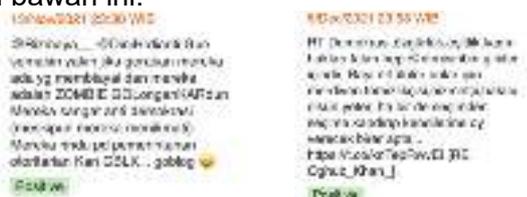


Figure 2. Tren Sentimen

Penggunaan media sosial yang tepat dalam mempromosikan dan mempertahankan demokrasi partisipatif di abad ke-21 memiliki potensi untuk memperdalam dan mengkonsolidasikan demokrasi terlepas dari pertumbuhannya (Isaac Adegboyega & Adesola Samson, 2015). Media sosial memfasilitasi penciptaan ruang di mana orang dapat memahami, berbagi, dan secara interaktif menegosiasikan makna tentang protes melalui dialog (Ucok-Sayrak & Deiliis, 2020).

Prosedur klasifikasi menentukan apakah tweet termasuk dalam kelas positif, yang meliputi pujian, rekomendasi, umpan balik, dan refleksi perasaan positif seperti kepuasan, kesenangan, dan kegembiraan. Sedangkan kelas negatif meliputi keluhan, sindiran, kritik, dan ekspresi emosi negatif seperti marah, kesal, dan kecewa. Temuan pelabelan ditunjukkan pada Gambar 3 dan 4 di bawah ini:



Gambar 3. Contoh penyebutan positif

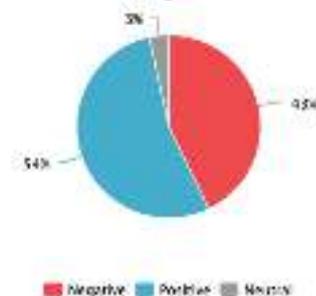
Gambar 3 di atas menggambarkan tweet positif tentang demokrasi dan kebebasan berpendapat, seperti yang terlihat pada 13

November dan 6 Desember 2021. Platform media sosial yang digunakan secara interaktif ditampilkan dan menggambarkan bahwa pengguna berkomunikasi secara interaktif dua arah setelah satu tahun momentum positif (Chahine & Malhotra, 2018). Sedangkan tweet negatif dapat dilihat pada Gambar 4 di bawah ini:



Gambar 4. Contoh penyebutan negatif

Gambar 2 dan Gambar 4 di atas menunjukkan bahwa tweet paling negatif dibuat oleh netizen pada tanggal 27 Mei dan 15 Juli 2021. Akibatnya, perasaan tidak menyenangkan itu lebih-lebihkan, dan sentimen negatif yang sebenarnya lebih dari yang terekam. Gambar 5 menunjukkan bahwa mood publik terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat 54% merespon positif, 43% merespon negatif, dan sisanya 3% merespon netral dari 1 Januari hingga 31 Desember 2021, sebagai berikut:



Gambar 5. Persentase Sentimen Publik

Gambar 5 menunjukkan sentimen positif mendominasi, namun tidak jauh berbeda dengan sentimen negatif terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat. Namun, ada juga banyak bukti yang menantang hubungan media sosial-demokratis. Seperti yang dikatakan narasi populer, siapa pun yang memiliki koneksi internet dan akun Twitter dapat membuat berita (Kalpokas, 2016). Platform Twitter memainkan peran penting dalam memobilisasi dan menghubungkan pengguna media sosial (DEMIR, 2020). Media dalam menjalankan kebebasan berekspresi sangat penting untuk mengkomunikasikan pikiran, pandangan, gagasan, filosofi, cita-cita, dan kegiatan (Hudoch, 1999).

Media sosial mengubah lanskap media informasi dan praktik ruang redaksi. Mereka diukur dengan analitik media sosial, dalam hal siapa yang menggunakan konten media sosial, di mana mereka berada, apa yang mereka lakukan dengannya, dan bagaimana konten tersebut beredar di jaringan (Makay, 2017). Meskipun media sosial mendemokratisasikan akses ke informasi, platform itu sendiri pada dasarnya tidak demokratis atau non-demokratis, tetapi merupakan alat yang dapat digunakan aktor politik untuk berbagai tujuan, termasuk, secara paradoks, tujuan yang tidak liberal (Tucker et al., 2017).

Dalam beberapa tahun terakhir, tanggung jawab platform media sosial terhadap penggunaannya dan masyarakat luas telah menjadi isu politik utama. Namun, respons regulasi terhadap krisis media sosial sebagian besar masih belum memuaskan. Selain itu, gagasan media sebagai ruang 'kebebasan institusional' dapat diterapkan pada tantangan masa kini dan dapat digunakan untuk memperkuat fungsi demokrasi media sosial (Wischmeyer, 2019). Mengingat sifat media baru yang partisipatif, interaktif, dan hemat biaya, mereka telah menjadi instrumen yang sesungguhnya untuk memperdalam cita-cita dan proses demokrasi dalam hal berbagi informasi, pemantauan, dan evaluasi proses pemilu, mengurangi ketegangan dan kecemasan yang terkait dengan pemilu, memastikan dan bahkan menegakkan transparansi dan akuntabilitas untuk sebagian besar. Studi ini, bagaimanapun, mengakui bahwa meskipun media sosial memiliki tantangan seperti kerentanan terhadap penyalahgunaan dan penodaan; ini dapat diminimalkan secara efektif jika tidak dihilangkan melalui pemantauan yang tepat dan kontrol peraturan tanpa mengorbankan kebebasan berekspresi.

D. KESIMPULAN

Berdasarkan temuan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa sebanyak 1.388.221 tweet terkumpul di Twitter dengan tweet "Demokrasi dan Kebebasan Berpendapat". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa respon masyarakat terhadap demokrasi dan kebebasan berpendapat selama tahun 2021 adalah positif dengan 54%, 43% merespon negatif, dan sisanya merespon netral sebesar 3%. Dengan demikian media sosial memfasilitasi

penciptaan ruang di mana orang dapat memahami, berbagi, dan secara interaktif merundingkan makna protes melalui dialog tentang demokrasi, meskipun data dan informasi yang disebarluaskan melalui media sosial seperti Twitter dapat dianggap tidak dapat diandalkan karena siapa pun yang memiliki akun dapat menyebarkan informasinya.

Lebih lanjut, temuan penelitian ini menunjukkan bahwa di Indonesia, netizen mengomentari berbagai isu, mulai dari isu Sara hingga pembubaran organisasi FPI oleh pemerintah, serta pandangan netizen terhadap sebagian besar aktivis media sosial di Indonesia yang menyebarkan, menghasut, dan memecah belah bangsa. Sementara itu, komentar dari negara Turki kerap menanggapi kebijakan Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menyusul pengumuman pembukaan Pulau Demokrasi dan Kebebasan di laut dekat Istanbul pada tahun 2021. Akibatnya, warga Turki memiliki perasaan yang saling bertentangan tentang kebijakan tersebut.

Dengan demikian, media sosial memfasilitasi penciptaan ruang di mana orang dapat memahami, berbagi, dan secara interaktif menegosiasikan makna protes melalui dialog tentang demokrasi, bahkan jika data dan informasi yang disebarluaskan melalui media sosial seperti Twitter dapat dianggap tidak dapat dipercaya karena siapa pun yang memiliki akun dapat menyebarkan informasi.

E. REFERENSI

- Astuti, P. (2016). Kebebasan Bereksprei Melalui Media Sosial dan Partisipasi Politik Pemilih Muda: Studi Kasus Pemilu di Jakarta, Indonesia. *Socrates*, 4(4), 74-88. https://books.google.com/books?hl=id&lr=&id=G8hyDgAAQBAJ&oi=fnd&pg=PT83&dq=source:journal+freedom+of+expression+social+media+twitter&ots=uoBfQa1sD-&sig=y3VXYQa-IHrbZr4OydL_jZr4y
- Behrend, J., & Whitehead, L. (2016). Perjuangan untuk demokrasi subnasional. *Jurnal Demokrasi*, 27(2), 155-169. <https://doi.org/10.1353/jod.2016.0023>
- Bueso, LD (2018). Kebebasan berekspresi di jejaring sosial. *Dalam Hukum dan Politik*

- Idp-Internet (Isu 27, hlm. 5–16).
caluniv.ac.in.
<https://www.caluniv.ac.in/global-mdia-journal/SR-2016-NOV/SR1.pdf>
- Burton, J. (2019). Serangan Cyber dan Kebebasan Berekspresi: Pemaksaan, Intimidasi, dan Pendudukan Virtual. Dalam *Baltic Journal of European Studies* (Vol. 9, Edisi 3, hlm. 116–133). sciendo.com.
<https://doi.org/10.1515/bjes-2019-0025>
- Chahine, S., & Malhotra, NK (2018). Dampak strategi media sosial pada harga saham: kasus Twitter. *Jurnal Pemasaran Eropa*, 52(7–8), 1526–1549.
<https://doi.org/10.1108/EJM-10-2017-0718>
- Chisom, OB (2021). Demokrasi dan Hak atas Kebebasan Berekspresi: Studi Kasus tentang Protes Pemuda Nigeria tentang Kebrutalan Polisi. Dalam *Jurnal Terbuka Ilmu Politik* (Vol. 11, Edisi 01, hlm. 34–53). scip.org.
<https://doi.org/10.4236/ojps.2021.111004>
- Couzigou, I. (2021). Legislasi Prancis Menentang Manipulasi Informasi Digital dalam Kampanye Pemilu: Sebuah Lingkup yang Dibatasi oleh Kebebasan Berekspresi. *Jurnal Hukum Pemilu: Aturan, Politik, dan Kebijakan*, 20(1), 98–115.
<https://doi.org/10.1089/elj.2021.0001>
- DEMIR, H. (2020). Perbedaan Pendapat dan Aktivisme Selama Protes Gezi Park: Peran Media Sosial dalam Advokasi Hak Ruang Publik dan Demokrasi. *Jurnal Ilmu Sosial Global*.
<http://journalsglobal.com/index.php/jgss/article/view/33>
- ukanovic, A. (2021). Pembatasan kebebasan berekspresi dalam praktik Pengadilan Hak Asasi Manusia Eropa dan gagasan disinformasi. *NBP-Jurnal Kriminalistik dan Hukum*.
<https://aseestant.ceon.rs/index.php/nabepo/article/view/33404>
- Eom, SJ, Hwang, H., & Kim, JH (2018). Bisakah media sosial meningkatkan respons pemerintah? Studi kasus Seoul, Korea. *Informasi Pemerintah Triwulanan*, 35(1), 109-122.
<https://doi.org/10.1016/j.giq.2017.10.002>
- Fahmi, I. (2017). Drone Emprit: Konsep dan Teknologi. *Kamp IT tentang Big Data dan Data Mining*, Jakarta.
<https://www.slideshare.net/IsmailFahmi3/drone-emprit-konsep-dan-teknologi>
- Fahmi, I. (2018). Drone Emprit Academic: Perangkat lunak untuk pemantauan dan analisis media sosial. Di *Drone Emprit Academic*. akademik.droneemprit.id
- Gammelgaard, K., & Holmøyvik, E. (2014). Menulis demokrasi: Konstitusi Norwegia 1814-2014. Dalam *Menulis Demokrasi: Konstitusi Norwegia 1814-2014* (Vol. 2). Taylor & Fransiskus.
<https://doi.org/10.1080/03468755.2017.1410364>
- Hayes, DM, & Zashin, EM (1975). Pembangkangan Sipil dan Demokrasi. *Sosiologi Kontemporer*, 4(3), 276.
<https://doi.org/10.2307/2063220>
- Helberger, N., Van Drunen, M., Eskens, S., Bastian, M., & Moeller, J. (2020). Perspektif kebebasan berekspresi tentang AI di media-dengan fokus khusus pada pengambilan keputusan editorial di platform media sosial dan di media berita. *Jurnal Hukum dan Teknologi Eropa*, 11(3).
https://lawreview.law.ucdavis.edu/issues/51/3/Essays/51-3_Balkin.pdf
- Hudoch, A. (1999). Peran Media dalam Demokrasi. In *Center for Democracy and Governance* (Isu Juni, hlm. 48). ijrar.org.
<https://www.ijrar.org/papers/IJRAR1AE P100.pdf>
- Idris, IK (2018). Media sosial pemerintah di Indonesia: Sekedar alat penyebaran informasi. *Jurnal Komunikasi: Jurnal Komunikasi Malaysia*, 34(4), 337–356.
<https://doi.org/10.17576/JKMJC-2018-3404-20>
- Isaac Adegboyega, A., & Adesola Samson, A. (2015). Media Sosial Baru dan Konsolidasi Demokrasi di Nigeria: Kegunaan, Potensi, dan Tantangan. Dalam *Journal of Good Governance dan Pembangunan Berkelanjutan di Afrika* (JGGSDA) (Vol. 2, Edisi 4, hlm. 47–58). afrikajsd.com. <http://afrikajsd.com/wp->

content/uploads/2020/07/5-Ajayi-Sola-
adegboyega.pdf

<https://doi.org/10.1089/elj.2019.0557>

- Jha, CK, & Kodila-Tedika, O. (2020). Apakah media sosial mempromosikan demokrasi? Beberapa bukti empiris. *Jurnal Pemodelan Kebijakan*, 42(2), 271–290.
<https://doi.org/10.1016/j.jpmod.2019.05.010>
- Kalpokas, I. (2016). Operasi Pengaruh : Menantang Media Sosial – Perhubungan Demokrasi. *Jurnal Urusan Global SAIS Eropa*.
<https://vb.vdu.lt/object/elaba:15805715/>
- Kim, J., & Hastak, M. (2018). Analisis jejaring sosial: Karakteristik jejaring sosial online setelah bencana. *Jurnal Internasional Manajemen Informasi*, 38(1), 86-96.
<https://doi.org/10.1016/j.ijinfmt.2017.08.003>
- Kouroupis, K., & Vagianos, D. (2021). Kebebasan berekspresi dan hak digital di media sosial: Tantangan dan risiko. *Jurnal Perlindungan dan Privasi Data*, 4(3), 294–302.
<https://www.ingentaconnect.com/content/hsp/jdpp/2021/00000004/00000003/art00006>
- Mackay, H. (2017). Analisis media sosial: Implikasi bagi jurnalisme dan demokrasi. *Jurnal Etika Informasi*, 26(1), 34-48.
<https://search.proquest.com/openview/7a72d20af4f5b0314781460611edcdac/1?pq-origsite=gscholar&cbl=2035668>
- Momen, MN (2020). Mitos dan Realitas Kebebasan Bereksprei di Internet. *Jurnal Internasional Administrasi Publik*, 43(3), 277–281.
<https://doi.org/10.1080/01900692.2019.1628055>
- Otte, E., & Rousseau, R. (2002). Analisis jaringan sosial: Sebuah strategi yang kuat, juga untuk ilmu informasi. *Jurnal Ilmu Informasi*, 28(6), 441–453.
<https://doi.org/10.1177/016555150202800601>
- Sobat, M. (2020). Media Sosial dan Demokrasi: Tantangan bagi Hukum dan Administrasi Pemilu di Kanada. *Jurnal Hukum Pemilu: Aturan, Politik, dan Kebijakan*, 19(2), 200–213.
- Pickard, V. (2014). Pertempuran Amerika untuk demokrasi media: Kemenangan libertarianisme perusahaan dan masa depan reformasi media. *Pertempuran Amerika untuk Demokrasi Media: Kemenangan Libertarianisme Korporat dan Masa Depan Reformasi Media*, 1–247.
<https://doi.org/10.1017/CBO9781139814799>
- Saraswati, A. (2019). Perlunya Melindungi Kebebasan Bereksprei di Internet Melalui Hak Asasi Manusia Berbasis di Indonesia. *Jurnal Studi Hukum ASEAN*.
https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=3540763
- Sreeramulu, M. (2018). Media sosial dan kebebasan berekspresi dengan referensi khusus ke pasal 66A undang-undang teknologi informasi tahun 2000-India. *Jurnal Internasional ZENITH* dari
<https://www.indianjournals.com/ijor.aspx?target=ijor:zijmr&volume=8&issue=7&article=014>
- Tucker, JA, Theocharis, Y., Roberts, ME, & Barberá, P. (2017). Dari pembebasan hingga kekacauan: Media sosial dan demokrasi. *Jurnal Demokrasi*, 28(4), 46–59.
<https://doi.org/10.1353/jod.2017.0064>
- Ucok-Sayrak, O., & Deiliis, DM (2020). “Chapuling” untuk kebebasan dan demokrasi di Gezi Park: Kasus etika komunikasi, konflik dan media sosial. *Jurnal Informasi, Komunikasi dan Etika dalam Masyarakat*, 18(1), 70–90.
<https://doi.org/10.1108/JICES-11-2018-0083>
- Vese, D. (2021). Mengatur Berita Palsu: Pengaturan Media Sosial dan Hak atas Kebebasan Bereksprei di Era Darurat. *Jurnal Regulasi Risiko Eropa*.
<https://doi.org/10.1017/err.2021.48>
- Wattney, M. (2020). Kebebasan berekspresi dan intimidasi: Hubungan yang tidak nyaman atau masalah interpretasi? *Tydskrif Vir Die Suid-Afrikaanse Reg*, 2020(2), 377–396.
<https://doi.org/10.10520/EJC-1cbc7699fa>

- Werayawarangura, N., Pungchaichan, T., & Vateekul, P. (2016). Analisis jaringan sosial dari catatan data panggilan untuk mengidentifikasi influencer dan komunitas. Konferensi Gabungan Internasional ke-13 2016 tentang Ilmu Komputer dan Rekayasa Perangkat Lunak, JCSSE 2016. <https://doi.org/10.1109/JCSSE.2016.7748864>
- Wischmeyer, T. (2019). Menjadikan media sosial sebagai instrumen demokrasi. *Jurnal Hukum Eropa*, 25 (2), 169-181. <https://doi.org/10.1111/eulj.12312>